

RENSTRA

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



TA. 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dokumen tersebut disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 ini mengelaborasi Program Dukungan Manajemen dan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus sebagai penetapan kinerja program selama lima tahun mendatang. Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan menerjemahkan dokumen tersebut kedalam rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Direktur Jenderal,



EKO D. HERIPOERWANTO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
2.1 TUJUAN.....	10
2.2 SASARAN PROGRAM.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	28
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.	43
3.3 KERANGKA REGULASI.....	48
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 TARGET KINERJA.....	60
4.2 KERANGKA PENDANAAN.	61
BAB V PENUTUP	
5.1 PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1: MATRIKS KERANGKA REGULASI.....	65
LAMPIRAN 2: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.	67
LAMPIRAN 3: INDIKASI PROYEK KPBU PUPR 2020-2024.....	91



DAFTAR GAMBAR

1.1 TARGET VISUM PUPR TAHUN 2020-2024 DAN 2030.....	3
1.2 GAP FUNDING VISIUM TAHUN 2020 – 2024.....	4
2.1 CASCADING PROGRAM DAN KEGIATAN DJPI TA. 2020-2024	14
3.1 REDESAIN PROGRAM KEMENTERIAN PUPR.....	47
3.2 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	50



DAFTAR TABEL

2.1 INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN CARA PERHITUNGAN.....	15
3.1 KONTRIBUSI KEMENTERIAN PUPR DALAM MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024.	36
3.2 REKAPITULASI SDM DJPI TAHUN 2019.....	58
3.3 REKAPITULASI SDM DJPI TAHUN 2019 BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	58
3.4 REKAPITULASI SDM DJPI TAHUN 2019 BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN.....	59
4.1 TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DJPI TAHUN 2020-2024.....	60
4.2 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN DJPI 2020-2024 PER UNIT KERJA (RP. JUTA).....	61
4.3 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN DJPI TA. 2020-2024 PER PROGRAM (RP.JUTA).	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan konektivitas ruang yang berdampak pada kemudahan akses terhadap sumber daya sehingga perekonomian nasional dan daya saing bangsa dalam persaingan global dapat meningkat. Berdasarkan *The Global Competitiveness Report* 2018-2019, Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50, turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya (terdapat perubahan Indikator setelah tahun 2017). Indonesia berada di peringkat ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40). Indonesia mengalami penurunan peringkat dari tahun 2018 ke 2019 (penurunan skor pada pilar 3 (*ICT Adoption*) dan pilar 5 (*Health*). Kondisi ini menjadi indikasi bahwa Pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada sektor infrastruktur karena sektor tersebut saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya dan strategi percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- i. **Sumber Daya Air**, yaitu meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, pembangunan air baku sebanyak 30,70 m³/detik, pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimen dan lahar sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km.
- ii. **Jalan dan Jembatan**, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867 km dan 58.346 m. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km.
- iii. **Perumahan**, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.
- iv. **Permukiman**, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

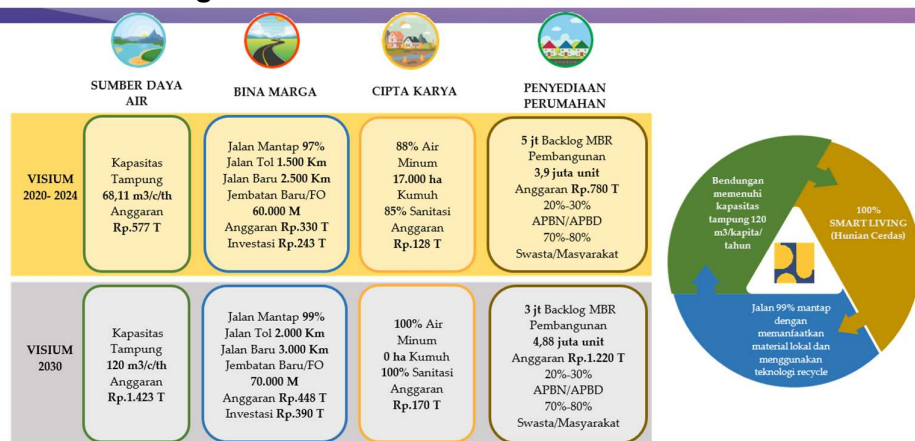


telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
- 100% *Smartliving* (Hunian Cerdas).

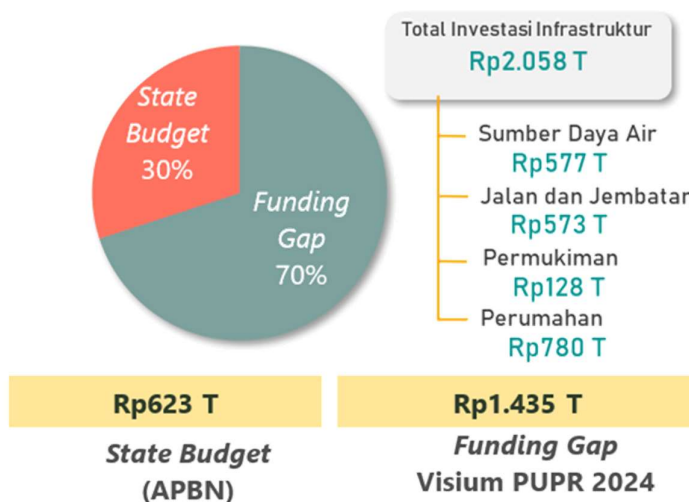
Pelaksanaan target visium tersebut, tentu tidak terlepas dengan berbagai pendekatan, diantaranya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, dan pengarusutamaan gender. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pengarusutamaan gender diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Gambar 1.1 Target Visium PUPR Tahun 2020 – 2024 dan 2030



Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp 623 Triliun. Sehingga terdapat *gap funding* untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.

Gambar 1.2 Gap Funding Visium Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPIW, Kementerian PUPR 2019

Sesuai Renstra Kementerian PUPR, diketahui bahwa pada tahun 2020-2024, alokasi pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp. 889 Triliun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karenanya Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang

komprehensif untuk memenuhi *gap funding* yang ada. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Amanat untuk penyelenggara pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengingat besarnya *gap funding* penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu: (1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN; (2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; (3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU; (4) Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU; (5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama; (6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU; (7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN; (8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK; (9) Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU, serta (10) Isu-isu strategis yang terkait dengan sektor pembiayaan perumahan yang merupakan domain Unit Organisasi sebelumnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan pembiayaan infrastruktur yang tidak mudah, namun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tetap merasa optimis dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Hal ini dikarenakan potensi pembiayaan KPBU yang sangat besar. Sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis proyek yang dapat menggunakan skema KPBU adalah sebagai berikut: (1) Jalan dan Jembatan, meliputi Jalan Tol, Jalan Nasional dan Jembatan; (2) Sumber Daya Air, meliputi waduk/bendungan, bendung, saluran pembawa air baku dan jaringan Irigasi; (3) Infrastruktur Permukiman, meliputi infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; serta (4) Perumahan, meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Beberapa potensi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah terkait potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta potensi di bidang pembiayaan perumahan. Adapun potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Target penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan cukup tinggi, sedangkan ketersediaan APBN terbatas. Sehingga memerlukan upaya membiayai proyek melalui pendanaan non APBN.
2. Pelaksanaan Proyek KPBU selama lima tahun terakhir masih didominasi sektor Jalan Tol. Sedangkan gap capaian sektor di luar tol masih cukup besar.

3. Salah satu strategi pendanaan dan pembiayaan visium PUPR 2030 adalah melalui pendanaan inovatif Non APBN.
4. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan Non APBN.
5. Adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Tahun 2024 yang membutuhkan pendanaan di luar APBN.

Adapun potensi di bidang pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang semakin menguat.
2. 56,75 % Rumah Tangga (RT) Indonesia menempati rumah yang layak huni.
3. Potensi pertambahan Rumah Tangga baru sebesar 720.000-800.000 RT belum sebanding dengan pasokan rumah bersubsidi sebesar 200.000 Unit per tahun.
4. Adanya komitmen Pemerintah untuk memperluas akses terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. Adanya target *Major Project* Pembangunan Rumah Susun di Perkotaan sebanyak 1.000.000 Unit selama 2020-2024.

Selain potensi lingkungan strategis, beberapa permasalahan yang menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu:

Permasalahan di bidang pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah:

1. Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43% dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara-negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64% sedangkan Cina 76% dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045;

2. Belum banyak rencana proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang akan dikerjakan melalui skema KPBU;
3. Keterbatasan dukungan fiskal Pemerintah terhadap proyek KPBU *Unsolicited*;
4. Masih banyak stakeholder yang belum memahami skema KPBU;
5. Masih panjangnya/lamanya proses penyiapan proyek KPBU;
6. Masih terbatasnya skema pembiayaan KPBU yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/ pemangku kepentingan khususnya dalam proses pengadaan lahan proyek KPBU;
8. Rendahnya minat Badan Usaha terhadap KPBU sektor SDA dan Perumahan karena kurang menguntungkan secara finansial;
9. Belum terdapat unit dalam Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai *Paying Agent* dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama, serta
10. Adanya keterbatasan anggaran Kementerian PUPR untuk pembiayaan KPBU-*Availability Payment*.

Permasalahan di bidang Pembiayaan Perumahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
2. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
3. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
4. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
5. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan perumahan dengan ketersediaan dana murah dan jangka panjang
7. Supply rumah belum sesuai dengan kebutuhan rumah MBR;



8. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

2.1 Tujuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020-2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - 2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - 3) Kapasitas tampung per kapita;
 - 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - 2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

- 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS3) dan (SS5), yaitu:

- a. **Sasaran Strategis ketiga (SS-3)**, yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - 2) **Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni**;
- b. **Sasaran Strategis kelima (SS-5)**, yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - 2) **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**;
 - 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan potensi, permasalahan, tantangan lingkungan strategis kedepan, dan keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif
2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

2.2 Sasaran Program

DJPI pada Tahun 2020-2024 akan mengampu 2 program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen (Koordinator: Sekretariat Jenderal); dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator: Ditjen Cipta Karya). Dua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-*breakdown* menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

- 1) **Sasaran Program** Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

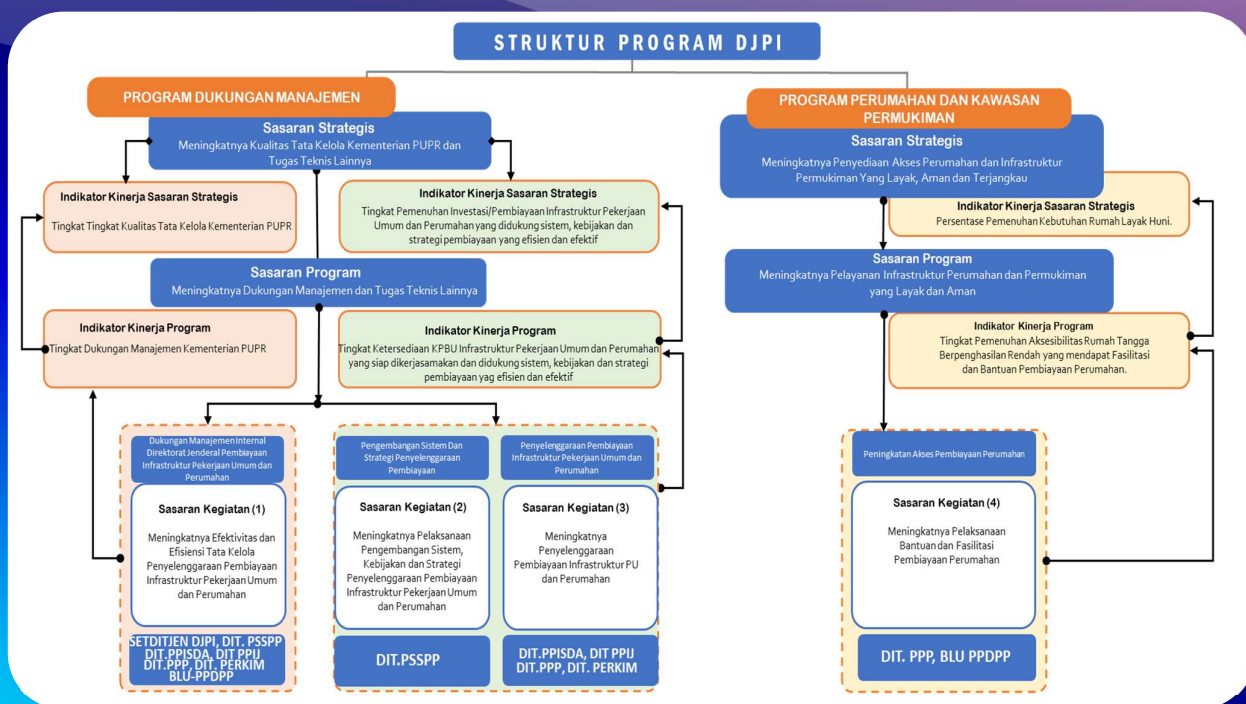
Indikator Kinerja Program terdiri dari dua indikator yaitu:

- a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI, BLU PPDPP dan Direktorat di lingkungan DJPI.
 - b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan.
- 2) **Sasaran Program** Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. **Indikator Kinerja Program** tersebut

mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Untuk mendukung (1) Program Dukungan Manajemen serta (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI berkontribusi terhadap capaian Sasaran Program melalui Sasaran Kegiatan (SK) Unit Kerja. Adapun Peta Strategis DJPI untuk (1) Program Dukungan Manajemen serta (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Cascading Program dan Kegiatan DJPI
TA. 2020 – 2024**





Tabel 2.1 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	2. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 01	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%) 2. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan (%) 3. Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%) 4. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%) 5. Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (15%): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) 		Internal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			6. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 7. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (%) 8. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%) 		
		2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%) Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%) Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 2 (15%): <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		Internal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		
	3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%) Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 3 (10%): <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) 		
	4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%) Laporan Kinerja yang disusun (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 4 (10%) <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%) 2. Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 5 (15%) 1. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		
	6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat (%) 2. Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 6 (10%) 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		
	7. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 7 (10%) 1. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%)		



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%)	2. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%)		
		8. Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 2. Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (%) 3. Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 8 (15%) 1. Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%) 3. Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%)		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	IKSS, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: • Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target.		Internal dan Eksternal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	<ul style="list-style-type: none"> Indikator 2 (70%) Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target. 		
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) 	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) <ol style="list-style-type: none"> 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) 		Internal dan Eksternal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 02	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		Internal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Indikator 2 (30%) <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB		
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air: <ol style="list-style-type: none"> Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: <ul style="list-style-type: none"> Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target 		Internal dan Eksternal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target • Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target 		Internal dan Eksternal
	3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target • Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target 		Internal dan Eksternal



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb: <p>Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target</p> <p>Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target</p>		Internal dan Eksternal
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (IKSS 02)	IKSS 02, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi hasil perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%).		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:</p> $A = Y + \left\{ \left(\frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) * 100 \right\} * \{X - Y\}$ <p>Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)</p>		
SP 01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	IKSP1, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	IKSP1, dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%) 2. Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target. Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.		Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera)
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi (%) 2. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Fasilitas Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.		Internal dan Eksternal (Bank)



SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)	Indikator 2 (25%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target. Indikator 3 (25%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.		



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024

Prioritas Pembangunan Nasional

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan **Prioritas Pembangunan** (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN_1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

PN_2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

PN_3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

PN_4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

PN_5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

PN_6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

PN_7. Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Arah Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024 mencakup arah kebijakan di sektor pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan serta sektor Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

- **Bidang Sumber Daya Air**

- i. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan terkait waduk multiguna adalah:

(1) Penyediaan infrastruktur tampungan air multiguna dan berkelanjutan. Strategi untuk kebijakan tersebut antara lain: (a) Penerapan standar internasional penilaian kelayakan pembangunan bendungan baru; (b) Penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pembangunan bendungan baru; (c) Pemanfaatan potensi waduk baru dengan pembangunan prasarana irigasi, air baku, dan PLTA melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (2) Pengembangan waduk multiguna secara terpadu dengan pengembangan kawasan KEK/KI. Strategi untuk kebijakan tersebut antara lain: (a) Penerapan skema investasi Large Scale Low Cost Hydropower for Industry; (b) Pemanfaatan potensi International Grid (HVDC) untuk peningkatan pasokan energi domestik dan komersial; (c) Optimalisasi link and

match potensi waduk multiguna dengan kebutuhan pengembangan Kawasan KEK/KI; serta (d) Penerapan HSAP-IHA (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) sebagai standar percepatan pemanfaatan infrastruktur SDA untuk PLTA dalam rangka meningkatkan kelayakan pembangunan waduk multiguna dengan skema KPBU.

Arah kebijakan terkait modernisasi irigasi adalah: Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta peternakan, tambak, dan pertanian non-padi. Strategi dari kebijakan tersebut antara lain: (a) Optimalisasi layanan jaringan irigasi untuk tanaman pangan; (b) Pengembangan layanan irigasi untuk peternakan, tambak, dan pertanian non-padi; (c) Penyusunan standar efisiensi dan kinerja penggunaan air untuk irigasi sesuai karakteristik petani; dan (d) Perbaikan sarana dan prasarana irigasi, yang diarahkan kepada isu adanya adaptasi infrastruktur dalam kerangka pemenuhan pelayanan, penyediaan dana, dan sumber daya manusia yang optimal sebagai salah satu pilar modernisasi irigasi khususnya melalui penyediaan pendanaan melalui skema KPBU.

ii. Pengelolaan Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan Arah kebijakan dalam pengelolaan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku yang aman dari sumber air sampai konsumen sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan (*water safety plan*). Strategi untuk kebijakan ini antara lain: (a) Optimalisasi sumber air baku dari bendungan; (b) Rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur penyedia air baku, Water Treatment Plant (WTP), serta sistem distribusi; dan (c) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi proyek KPBU Saluran Air Baku (SAB) dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka KPBU proyek gabungan (*bundling project*).

- **Bidang Jalan dan Jembatan**

- i. Peningkatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas jalan dilaksanakan untuk mengurangi waktu tempuh. Waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global. Diharapkan pada tahun 2024 dapat diwujudkan dominasi jaringan jalan nasional yang memiliki waktu tempuh dibawah 2,0 jam/100 km (dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam).

- ii. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas akan didorong untuk mendukung simpul/kawasan wilayah strategis yang sudah terhubung jalan nasional, khususnya yang mendukung pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Aceh-Provinsi Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh. Sementara itu, pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara, seperti diantaranya dengan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga dapat mendukung berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut.

- iii. Peningkatan Kapasitas Jalan

Peningkatan kapasitas jalan didorong untuk menjadi solusi kemacetan telah menjadi persoalan utama pada jaringan jalan nasional yang menyebabkan rendahnya tingkat kinerja angkutan barang dan orang. Peningkatan kapasitas jalan juga diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (road overloading) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan.

Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis *User Charge* dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis *Availability Payment (AP)* yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

- **Bidang Permukiman**

- i. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah : Meningkatkan tata kelola kelembagaan melalui (a) peningkatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah; (b) peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; (c) peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antarstakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, unit pelaksana, dan masyarakat) melalui penguatan peran Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS)/ AMPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; (d) pembentukan badan regulator air minum; (e) penyusunan undang-undang air minum dan air limbah; serta (f) pengembangan sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan skema investasi badan usaha melalui KPBU.

i. Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses sanitasi layak dan aman, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) **Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif (KPBU)**; (c) **Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain**; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut, dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan, melalui: (a) penguatan fungsi operator dan regulator; (b) penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (Fecal Sludge Management); (c) penyediaan layanan terintegrasi air minum, air limbah dan persampahan; (d) pengembangan kawasan dengan layanan air siap minum (portable water) / Zona Air Minum Prima (ZAMP); dan (e) peningkatan keandalan pengelolaan jaringan air minum melalui Smart Grid Water Management.
- 2) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota.

• **Bidang Perumahan**

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang

inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Srateginya adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan (*Demand Site*):

- Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
- Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
- Pengembangan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

2. Sisi Pasokan (*Supply Side*):

- Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
- Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
- Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
- Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
- Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana

Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

3. Sisi *Enabling Environment*:

- Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
- Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
- Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
- Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
- Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Nasional dan daerah.

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.



1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
2. Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
3. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
4. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar *Major Project* yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam *Major Project* RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024)• Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
2	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024 	30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.l Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
4	Pembangunan Wilayah Batam– Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan 	69,9 • APBN: 6,4 • KPBU: 9,5 • Badan Usaha 54,0	a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan 	229,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
6	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah 	466,04 • APBN: 90,35 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,33	a.l KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BNP, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 	134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Badan Usaha, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
8	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan 	27,5 (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian Desa PDTT, Kemenhub, Pemda
9	Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana 	15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
10	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 	3,4 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,0 KPBU: 0,4 	a.I KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP
11	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> hingga 14% 	87,1 (APBN)	a.I Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
12	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 	308,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 105,5 KPBU: 203,0 	a.I KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta–Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: <ul style="list-style-type: none"> Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	63,6 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 58 Badan Usaha: Rp42 	a.I Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha).	a.I Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
15	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya penyelesaian target program 35.000 MW Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 	1.121,0 <ul style="list-style-type: none"> (Badan Usaha) 	a.I KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon 	54,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: 31,4 KPBU: 18,7 APBD: 4,8 	a.I KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 		
17	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI 	92,9 APBN: 12,9 KPBU: 24,0 Swasta: 60,0	a.l KemenPUPR, Swasta
18	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	12,4 (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda
19	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalam, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	15,4 (APBN)	a.l KemenPUPR,
20	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	140 APBN: 73,5 APBD: 1,7 Masyarakat: Swasta 65,7	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan Masyarakat
21	Akses Air Minum Perpipa (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	123,5 APBN: 77,9 APBD: 15,6 KPBU: 29,9	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
22	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh 	397,9 APBN: 18,0 APBD: 109,2 BUMN: 28,0 Swasta: 237,5 Masyarakat: 5,0	a.l Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat
23	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	30,9 (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Pembangunan ibu kota baru akan menempati lahan seluas 5.600 Ha dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 466 Triliun yang bersumber dari APBN, KPBU & Swasta serta pengembangan PNPB-earmark untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR

Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “*infrastructure for all*” yang memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan *Focal Point*) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (*Gender Analyst Pathway/GAP*) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan

penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebaran informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerja sama dengan multi pihak (K/L, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

Arah Kebijakan PUPR Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Arah kebijakannya adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Arah kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020-2024;
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis/ memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;

9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Strategi kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong revisi Peraturan Presiden 38 tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur ;
2. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peningkatan koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
4. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
5. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
6. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* KPBU infrastruktur;

7. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI;
8. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
9. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa;
10. Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi Dokumen Permohonan PDF (DPP);
11. *Re-focussing* kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan;
12. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur;
13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
14. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya baik dari sisi *demand* dan *supply*;
15. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
16. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan;
17. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA;
18. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan; dan
19. Mendorong Kerjasama dan Investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

Adapun sararan strategis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan Norma, Standar, Peraturan Dan Kriteria (NSPK) di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Terlaksananya fasilitasi perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Terwujudnya peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai simpul KPBU Kementerian PUPR;
5. Tersusunnya skema kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik dalam rangka kepemilikan rumah umum maupun pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya yang lebih efektif dan efisien;
6. Terlaksananya fasilitasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
7. Terlaksananya bantuan/subsidi di pembiayaan perumahan sebanyak 968.654 Unit
8. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan dari Lembaga Keuangan (PT. SMF dan TAPERA) sebanyak 550.000 Unit.

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 2 program dan 4 kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 3.1 Redesain Program Kementerian PUPR

	PROGRAM EKSISTING	REDESAIN PROGRAM
SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Peningkatan Sarpras ASN KemenPUPR 	Program Dukungan Manajemen
ITJEN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
BPSDM	Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
BPIW	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Dukungan Manajemen
DJBK	Program Pembinaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
DJPI	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJCK	Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJP	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJSDA	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Ketahanan Sumber Daya Air
DJBM	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Infrastruktur Konektivitas

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.
- Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Serta Bantuan Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan

Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15) Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (25) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; **(26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.**

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi DJPI untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Regulasi-regulasi yang akan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam selama periode Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

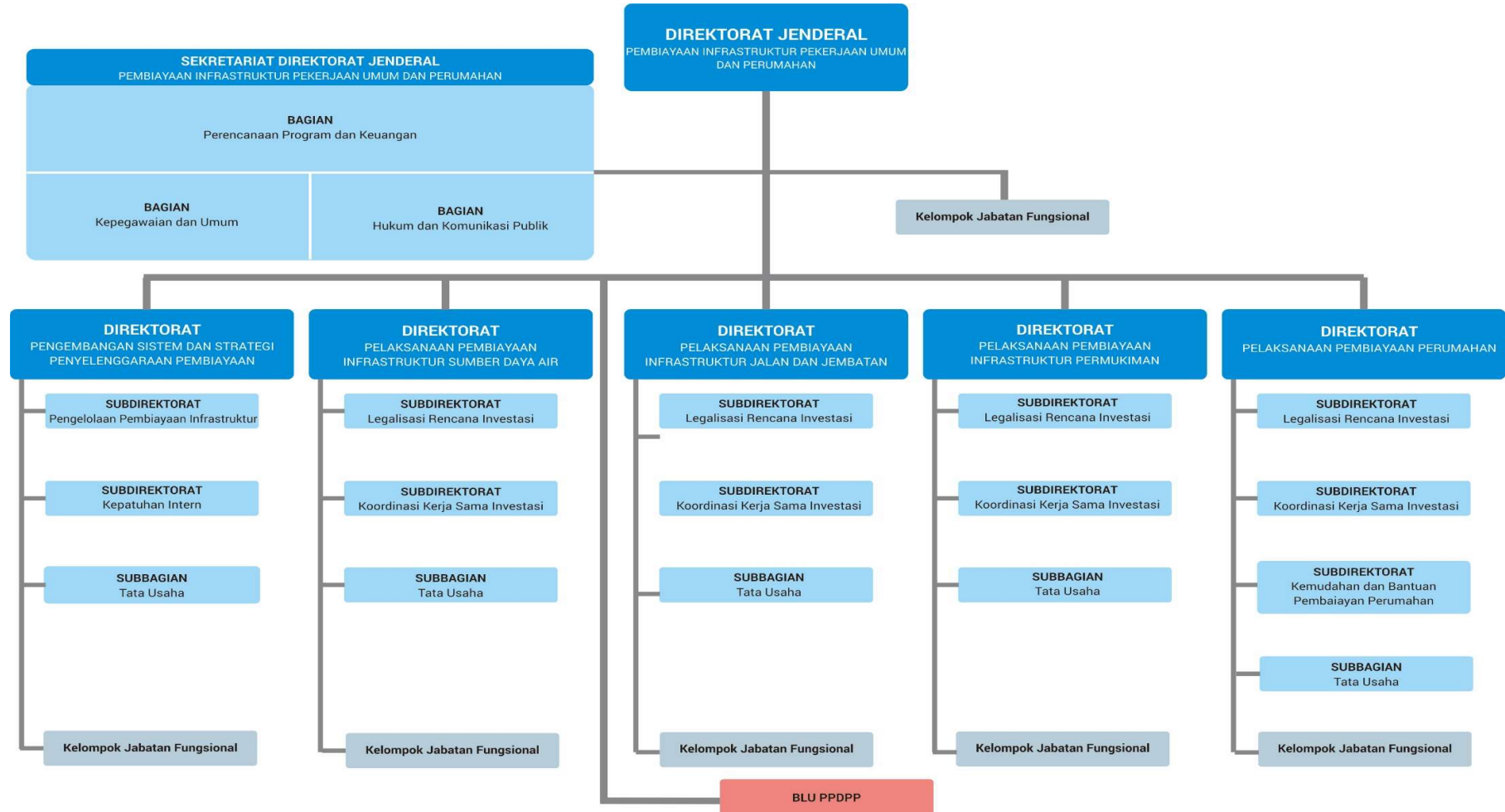
3.4 Kerangka Kelembagaan

Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berikut disampaikan kerangka kelembagaan di DJPI sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Unit Kerja Eselon 2 Mandiri BLU PPDPP sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.



Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan



Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unit organisasi yang akan mengemban sebagian Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan melaksanakan program pengembangan pendanaan dan sistem pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024.

Tugas

Tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang harus diselenggarakan adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Penetapan sumber pendanaan, dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

- Fungsi :
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - Pelaksanaan penatausahaan BMN;
 - Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi
 - Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional
 - Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal
 - Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum
 - Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri dari:

- Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

- Tugas :
- Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

- Fungsi :
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal
 - Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat



Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, terdiri dari:

- Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- Sub Direktorat Kepatuhan Intern; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman

- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan

- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari:

- Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi;
- Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan; dan
- Subbagian Tata Usaha.

7. Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP)

Tugas : Melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan

Fungsi :

- Pelayanan pembiayaan perumahan;
- Pengelolaan keuangan
- Pengelolaan operasi kegiatan
- Pengelolaan urusan umum dan hukum
- Pelaksanaan pemeriksaan intern

BLU-PPDPP, terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Layanan
- Direktur Keuangan
- Direktur Operasi
- Direktur Umum dan Hukum
- Satuan Pengawasan Intern



Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan. Saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 143 orang. Dalam mendukung tercapainya kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan juga dibantu oleh pegawai non-PNS sebanyak 302 orang yang terdiri dari Konsultan Individu (KI) dan tenaga pendukung, serta CPNS sebanyak 35 orang, sehingga total SDM pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan pada tahun 2019 sebanyak 480 orang.

Tabel 3.2 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019

No	Unit Kerja	CPNS	PNS	Non PNS		Jumlah
				Substansi	Pendukung	
1	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	6	43	39	20	108
2	Dit. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi (PSSPP)	6	18	27	7	58
3	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	6	15	13	7	41
4	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5	15	15	8	43
5	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	6	20	27	4	57
6	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	6	16	22	7	51
7	PPDPP	0	16	85	21	122
TOTAL		35	143	228	74	480

Sumber: Laporan Kinerja Eselon II dan PPDPP

Tabel 3.3 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019
Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	NON PNS		JUMLAH
			Substansi	Pendukung	
Laki-Laki	17	62	154	63	296
Perempuan	18	81	74	11	184
TOTAL	35	143	228	74	480

Tabel 3.4 Rekapitulasi SDM DJPI Tahun 2019
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	CPNS	PNS	Non Pns		Jumlah
				Substansi	Pendukung	
1	S3		3			3
2	S2		65	24	2	91
3	S1	35	60	170	18	283
4	D3		2	15	1	18
5	SMA		12	18	37	67
6	SMP		0	1	13	14
7	SD		1		3	4
TOTAL		35	143	228	74	480

Sumber: Laporan Kinerja Eselon II dan PPDPP

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melakukan upaya-upaya antara lain melalui:

1. Pelaksanaan *capacity building* Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Pelatihan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
6. Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan dalam pertemuan atau seminar/*workshop/short course* (pendidikan/pelatihan singkat).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024. Target kinerja terdiri dari target sasaran program (*outcome*) dan target sasaran kegiatan (*output*). Target sasaran program (*outcome*) dan output sebagaimana terlampir.

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
DJPI Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
SS3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat								
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	98,57	DJCK
		(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48	DJP dan DJPI
SS5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (%)	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44	Setjen dan Dukman Seluruh Unor
		Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI



4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis DJPI sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 4.706.394.000.000, matrik kerangka pendanaannya dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJPI 2020 – 2024
Per Unit Kerja (Rp. Juta)

NO	UNIT ORGANISASI	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL (Juta Rp)
1	Setditjen DJPI	69.068	62.094	66.859	70.938	75.266	344.224
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	41.240	52.221	24.602	23.500	23.500	165.063
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	12.042	23.000	48.290	44.125	45.050	172.507
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	18.779	114.150	32.921	33.870	34.847	234.567
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	13.273	21.600	34.500	34.500	31.500	135.373
6	Direktorat Pelaksanaan* Pembiayaan Perumahan	1.317.882	1.655.562	101.607	98.143	104.303	3.277.496
7	BLU PPDPP	71.954	72.954	75.142	77.396	79.718	377.163
TOTAL							4.706.394

Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJPI 2020 – 2024
Per Program (Rp. Juta)

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman*	1.335.572	1.668.152	69.123	56.015	58.750	3.187.612
Program Dukungan Manajemen	208.666	333.429	314.797	326.456	335.434	1.518.782
Total						4.706.394

Keterangan = *Termasuk PHLN NHAP 2020-2021

Berdasarkan Visium PUPR 2030, total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur PUPR pada RPJMN IV setidaknya mencapai 2.058 Triliun Rupiah dengan rincian kebutuhan anggaran per sektor, yaitu: (1) Sektor Sumber Daya Air sebesar 577 Triliun Rupiah; (2) Sektor Jalan dan Jembatan sebesar 573 Triliun Rupiah; (3) Sektor Permukiman sebesar 128 Triliun Rupiah; dan (4) Sektor Perumahan sebesar 780 Triliun Rupiah. Total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur ini tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan anggaran Pemerintah karena APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi sekitar 30% (623 Triliun Rupiah) dari total kebutuhan anggaran. Sedangkan sesuai dokumen Renstra Kementerian PUPR, diketahui bahwa pada tahun 2020-2024, alokasi pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp. 889 Triliun.

Sebagai salah satu inovasi alternatif pembiayaan infrastruktur untuk menutupi gap pendanaan sebesar 70% (1.435 Triliun Rupiah) tersebut adalah dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU. Melalui skema ini, Badan Usaha terikat hubungan kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana penyelenggaraannya menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara kedua belah pihak.

Total indikasi proyek KPBU sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024 adalah sebanyak 87 proyek KPBU dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 874 Triliun (1) Sektor Sumber Daya Air sebanyak 9 proyek dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 14 Triliun; (2) Sektor Jalan dan Jembatan sebesar 51 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 687 Triliun; (3) Sektor Permukiman sebanyak 18 proyek dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 29 Triliun; dan (4) Sektor Perumahan sebanyak 9 proyek dengan indikasi nilai investasi sebesar Rp. 142 Triliun. matrik Indikasi Proyek KPBU 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Rencana Strategis DJPI tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Kerja di lingkungan DJPI untuk menyusun Renstra Unit Eselon II dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan beserta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2022) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi

Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan DJPI

Lampiran 3: Indikasi Proyek KPBU 2020-2024



Lampiran 1 Arah Kerangka Dan/Atau Kebutuhan Regulasi

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERD. EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
1	Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unor di Kementerian PUPR	2020
2	Revisi Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Peraturan Presiden terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kementerian PUPR	2020-2021
3	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPNU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
4	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024
5	Pedoman Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024
6	Pedoman Penyusunan Dokumen Transaksi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024
7	Pedoman Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020



NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERD. EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
8	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
9	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
10	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020
11	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI	2021
12	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII	2021
13	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
14	Pedoman Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
15	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
16	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
17	Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyiapan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2022



Lampiran 2 Matriks Program, Kegiatan, dan Pendanaan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	2,001,581	383,920	382,472	394,183	4,706,394
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN									208,666	333,429	314,797	326,456	335,434	1,518,782
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)						118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44							
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)						118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	15	15	15	15						



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	15	15	15	15	15	15	15						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	10	10	10	10	10	10	10						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	10	10	10	10	10	10	10						
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	15	15	15	15	15	15	15						
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik		%	10	10	10	10	10	10	10						
7	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP		%	10	10	10	10	10	10	10						
8	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP		%	15	15	15	15	15	15	15						
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan																
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan											74,068	67,094	71,859	75,938	80,266	369,224
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
	1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
2	Manajemen Transformasi Organisasi		Layanan	2	2	2	2	2	2	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6,629
	1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	2	2	2	2	2	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6,629



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pengelolaan Pegawai		Orang	260	260	260	260	260	260	260	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	3	3	3	3	3	15	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689
5	Kerumahtanggaan		Layanan	3	2	2	2	2	2	11	2,810	1,000	1,061	1,126	1,194	7,191
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	3	2	2	2	2	2	11	2,810	1,000	1,061	1,126	1,194	7,191
6	Advokasi Hukum		Layanan	2	2	2	2	2	2	10	1,109	800	849	901	956	4,614
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	2	2	2	2	2	10	1,109	800	849	901	956	4,614
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		Layanan	3	3	3	3	3	3	15	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	3	3	3	3	15	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1,002	1,063	4,672
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1,002	1,063	4,672
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		Layanan	4	2	2	2	2	2	12	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,308



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	4	2	2	2	2	2	12	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,308
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
12	Strategi Komunikasi		Layanan	2	2	2	2	2	2	10	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	2	2	2	2	2	10	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
13	Publikasi		Layanan	3	2	2	2	2	2	11	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	3	2	2	2	2	2	11	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I		Laporan	1	1	1	1	1	1	5	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II		Laporan	1	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI		Laporan	2	1	1	1	1	1	6	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	1	1	1	1	1	6	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI		Unit	1	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI		Unit	1	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	1	1	1	1	1	1	5	410	410	435	462	490	2,206
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	1	1	5	410	410	435	462	490	2,206
20	Gaji dan Tunjangan DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
21	Opersonalisasi Kantor DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	15,540	20,802	22,071	23,417	24,846	106,676
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	15,540	20,802	22,071	23,417	24,846	106,676
PELAKSANA: Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan											1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Opersonalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan											1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Opersonalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air											1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat			Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman											1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat			Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan											1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Opersionalisasi Kantor Direktorat			Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)											44,113	45,113	46,467	47,860	49,296	232,851
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BLU PPDPP			Unit	1	1	1	1	1	5	100	100	103	106	109	518
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		Unit	1	1	1	1	1	5	100	100	103	106	109	518



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU PPDPP		Unit	1	1	1	1	1	5	400	400	412	424	437	2,073	
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	5	400	400	412	424	437	2,073	
3	Gaji dan Tunjangan BLU PPDPP		Layanan	1	1	1	1	1	5	23,290	29,290	30,169	31,074	32,006	145,828	
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	23,290	29,290	30,169	31,074	32,006	145,828	
4	Operasionalisasi Kantor BLU PPDPP		Layanan	1	1	1	1	1	5	16,869	13,844	14,103	14,377	14,664	73,857	
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16,869	13,844	14,103	14,377	14,664	73,857	
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLU PPDPP		Layanan	1	1	1	1	1	5	3,455	1,480	1,680	1,880	2,080	10,574	
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,455	1,480	1,680	1,880	2,080	10,574	
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
1	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif		%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707	
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :																
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yag efisien dan efektif		%	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan																
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan											40,240	51,221	23,602	22,500	22,500	160,063
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan			Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	16,316	10,877	-	-	-	27,193
	1	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4,500	2,625	-	-	-	7,125
	2	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5,004	2,700	-	-	-	7,704
	3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6,812	5,553	-	-	-	12,365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			Rekomendasi Kebijakan	6	5	6	6	6	29	4,317	21,734	6,000	6,000	6,000	44,051



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Draft Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	2	2	2	12	3,203	1,600	2,500	2,500	2,500	12,303
	2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2	10	1,114	19,357	1,500	1,500	1,500	24,971
	3	Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Dana dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	1	3	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000
	4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kemitraan dan Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	1	4	-	777	1,000	1,000	1,000	3,777
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	6	6	6	29	3,871	5,000	6,000	6,000	6,000	26,871
	1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4	4	20	2,531	3,400	4,000	4,000	4,000	17,931
	2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	1	4	-	750	1,000	1,000	1,000	3,750
	3	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	1,340	850	1,000	1,000	1,000	5,190
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		NSPK	2	0	1	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	1	5	1,575	-	2,000	2,000	2,000	7,575
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856	
	1	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7,144	6,610	1,102	-	-	14,856	
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
	2	Jumlah Laporan Layanan dan konsultasi Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
	3	Jumlah Laporan Pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Internal di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Layanan	4	4	4	4	4	20	3,127	2,000	3,000	3,000	3,000	14,127	
	1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	949	1,000	1,000	1,000	1,000	4,949	
	2	Jumlah Dokumen pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,622	500	1,000	1,000	1,000	5,122	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	556	500	1,000	1,000	1,000	4,056
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Laporan	7	3	3	3	3	3	19	3,890	2,000	2,500	2,500	2,500	13,390
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3	1	1	1	1	1	7	1,866	900	1,000	1,000	1,000	5,766
	2	Jumlah Laporan dan Informasi pimpinan di bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	1	6	1,274	700	1,000	1,000	1,000	4,974
	3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		%	25	25	25	25	25	25	25	11,042	22,000	47,290	43,125	44,050	167,507
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		%	25	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
3	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		%	25	25	25	25	25	25	25	12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
4	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		%	25	25	25	25	25	25	25	9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan																
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan											17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	3	3	17	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	2	11	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600	
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400	
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200	
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100	
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100	
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700	
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700	
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500	
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500	
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air											11,042	22,000	47,290	43,125	44,050	167,507
	OUTPUT KEGIATAN :															

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	4	2	3	4	4	4	17	1,894	1,200	3,100	4,725	5,150	16,069
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	1	7	1,368	600	600	700	800	4,068
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	3	3	3	10	525	600	2,500	4,025	4,350	12,000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	2	2	2	8	946	2,100	600	2,400	2,400	8,446
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	2	2	2	8	946	2,100	600	2,400	2,400	8,446
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	3	5	4	3	4	4	19	3,603	11,550	31,900	23,600	23,600	94,253
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	2	9	2,803	1,500	14,400	20,000	14,000	52,703
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	4	2	1	2	2	10	800	10,050	17,500	3,600	9,600	41,550
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
5	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	1	2	2	2	2	2	9	1,469	4,000	5,090	5,500	5,800	21,859



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	2	2	9	980	1,000	2,440	2,600	2,750	9,770
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	2	2	2	9	489	3,000	2,650	2,900	3,050	12,089
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		NSPK	4	2	2	2	2	2	12	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	2	2	2	12	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Laporan	3	2	4	4	4	4	17	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	4	17	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Laporan	1	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1,376
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1,376
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman											12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	2	11	1,807	1,800	1,800	1,800	1,800	9,007
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	1	6	1,207	800	800	800	800	4,407



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	600	1,000	1,000	1,000	1,000	4,600
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2	10	1,673	5,500	19,000	19,000	16,000	61,173
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	700	4,000	10,000	10,000	10,000	34,700
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	973	1,500	9,000	9,000	6,000	26,473
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	900	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	900	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
5	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	3,781	6,800	5,100	5,100	5,100	25,881	
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	3	3	15	1,454	2,800	2,500	2,500	2,500	11,754	
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	2,326	4,000	2,600	2,600	2,600	14,126	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		NSPK	0	1	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2,000
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2,000
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	4	3	3	3	3	3	16	3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	19,713
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	3	3	3	16	3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	19,713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	1	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1,437
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1,437
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan											9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	1	6	600	500	750	1,000	1,000	3,850
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	5	300	500	750	1,000	1,000	3,550
	2	Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150	
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150	
3	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	1,750	5,750	30,000	35,000	36,500	109,000	
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	1	1	7	875	5,750	15,000	17,500	18,250	57,375	
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	4	875	0	15,000	17,500	18,250	51,625	
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500	
	1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500	
5	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	4,000	4,096	21,000	25,000	26,307	80,403	
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	3	2	2	2	2	11	3,500	2,096	17,000	20,000	20,307	62,903	
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500	
6	NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan		NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500	
	1	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		Laporan	1	1	1	1	1	5	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576	
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576	
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		Laporan	1	1	1	1	1	5	150	300	300	300	168	1,218	
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	150	300	300	300	168	1,218	
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau										1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni		%	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612	
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			%	100	100	100	100	100	100							
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :																
1	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612	
KEGIATAN 4: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	50	50	50	50	50	50	50	1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	50	50	50	50	50	50	50	27,840	27,840	28,675	29,535	30,422	144,312
KOORDINATOR : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan																
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan											1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		Rekomendasi Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3,250	3,250	7,100	7,760	8,486	29,846	
	1	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2,500	1,500	4,400	4,840	5,324	18,564	
	2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1,000	2,200	2,420	2,662	9,032	
	3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	2,250	
2	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782	
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		Laporan	4	2	2	2	2	2	12	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	2	2	2	12	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Rumah Tangga	31,823	39,684	312	0	0	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343	
	1	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	-	-	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343	
5	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka		Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000	
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000	
		SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175,000	100,000	0	0	0	275,000	4,657,982	5,969,486	4,930,376	4,865,899	4,804,866	25,228,609	
		SBUM (BA.999.07)	Rumah Tangga	263,000	157,500	200,000	220,000	220,000	1,060,500	1,064,000	945,000	1,200,000	1,320,000	1,320,000	5,849,000	
6	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Layanan	1	1	1	0	0	3	4,500	5,000	5,000	0	0	14,500	
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	0	0	3	4,500	5,000	5,000			14,500	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100	
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100	
		SMF (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	8,460	10,000	10,000	10,000	11,540	50,000							
		Tapera (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	500,000							
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)										27,840	27,840	28,675	29,535	30,422	144,312	
	OUTPUT KEGIATAN :															
1	Fasilitasi Penyaluran FLPP		Layanan	3	3	3	3	3	15	8,550	5,600	5,768	5,941	6,119	31,978	
	1	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	Laporan	2	2	2	2	2	10	5,500	3,550	3,657	3,766	3,879	20,352	
	2	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan	Lembaga	30	30	30	30	30	30	1,500	1,500	1,545	1,591	1,639	7,775	
	3	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000	900,000	1,550	550	567	583	601	3,851	
		FLPP (BA.999.03)	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000	900,000	9,000,000	12,000,000	14,500,000	17,000,000	17,000,000	69,500,000	
2	Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan Perumahan		Layanan	3	2	3	2	2	12	2,354	1,436	1,479	1,523	1,569	8,362	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan	Layanan	3	2	3	2	2	12	2,354	1,436	1,479	1,523	1,569	8,362	
3	Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan		Layanan	40	45	45	45	45	220	2,788	2,788	2,871	2,957	3,046	14,450	
	1	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	45	45	45	2,788	2,788	2,871	2,957	3,046	14,450	
4	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja		Layanan	45	45	45	45	45	225	1,355	1,115	1,148	1,183	1,218	6,019	
	1	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Layanan	45	45	45	45	45	225	1,355	1,115	1,148	1,183	1,218	6,019	
5	Teknologi dan Informasi Bantuan Pembiayaan Perumahan		Layanan	1	1	1	1	1	5	1,800	1,800	1,854	1,910	1,967	9,331	
	1	Jumlah Pelayanan Sistem, Tekologi, dan Informasi Pembiayaan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,800	1,800	1,854	1,910	1,967	9,331	
6	Pendayagunaan Database Bantuan Pembiayaan Perumahan		Layanan	2	2	2	2	2	10	1,000	1,000	1,030	1,061	1,093	5,184	
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Layanan	2	2	2	2	2	10	1,000	1,000	1,030	1,061	1,093	5,184	
7	Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		Layanan	1	1	1	1	1	5	2,900	2,900	2,987	3,077	3,169	15,033	
	1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Layanan	1	1	1	1	1	5	2,900	2,900	2,987	3,077	3,169	15,033	
8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)		Layanan	3	3	3	3	3	15	1,500	2,600	2,678	2,758	2,841	12,377	
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	3	3	15	1,500	2,600	2,678	2,758	2,841	12,377	



PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Publikasi dan Kehumasan		Layanan	2	2	2	2	2	2	10	3,135	6,144	6,328	6,518	6,714	28,840
	1	Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Kehumasan	Layanan	2	2	2	2	2	2	10	3,135	6,144	6,328	6,518	6,714	28,840
10	Pengelolaan Aset BLU		Layanan	3	3	3	3	3	3	15	200	200	206	212	219	1,037
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU	Layanan	3	3	3	3	3	3	15	200	200	206	212	219	1,037
11	Hukum dan Kepatuhan		Layanan	1	1	1	1	1	1	5	260	260	268	276	285	1,350
	1	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	260	260	268	276	285	1,350
12	Pengawasan Internal		Layanan	24	24	24	24	24	24	120	800	800	824	849	874	4,147
	1	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	24	24	24	120	800	800	824	849	874	4,147
13	Pembinaan Manajemen		Layanan	2	2	2	2	2	2	10	1,197	1,197	1,233	1,270	1,308	6,205
	1	Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	2	2	2	10	1,197	1,197	1,233	1,270	1,308	6,205



Lampiran 3 Indikasi Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tahun 2020-2024

Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)
Sumber Daya Air	Bendungan Merangin	4,787,000,000,000	Bendungan Pasir Kopo	2,895,000,000,000	SPAB Karian Barat	413,786,000,000	Bendungan Rongkong	2,216,000,000,000	D.I. Karangnongko	788,598,000,000
			SPAB Sidan	796,411,000,000			Bendungan Matenggeng	2,731,000,000,000		
Jalan dan Jembatan	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau	585,500,000,000	Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta	25,060,000,000,000	Jalan Tol Banjarbaru-Batulicin	21,000,000,000,000	Jalan Tol Malay-Tarakan	59,400,000,000,000	Jalan Tol Sampit-Pangkalan Bun	21,000,000,000,000
	Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci	26,150,000,000,000	Jalan Tol Demak-Tuban	23,850,000,000,000	Jalan Tol Bontang-Sangatta	7,200,000,000,000	Jalan Tol Palangkaraya-Banjarmasin	23,850,000,000,000	Jalan Tol Pangkalan Bun-Lamandau	24,000,000,000,000
	Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF)	2,920,000,000,000	Jalan Tol Jember-Lumajang	8,020,000,000,000	Jalan Tol Banjarmasin-Batulicin	32,895,000,000,000	Preservasi Jalan Lintas Tengah Sumatera	84,616,000,000,000	Jalan Tol Kuala Kapuas-Banjarmasin	5,850,000,000,000
	Jalan Tol Semarang Harbour	12,051,000,000,000	Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat	14,670,000,000,000	Jalan Tol Sangatta-Malay	11,250,000,000,000	Preservasi Jalan Lintas Barat Sumatera		Jalan Tol Balikpapan-Sepaku	2,550,000,000,000
			Jalan Tol Jember-Situbondo	10,500,000,000,000	Jembatan Sumatera-Bangka (Pembangunan)	13,000,000,000,000	Jalan Baru Slarang-Ayah	629,000,000,000	Jalan Tol Palangkaraya-Sampit	24,000,000,000,000



Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)
			Jalan Tol Tulungagung-Kepanjen	9,990,000,000,000	Jalan Tol JC III Outer Ringroad IKN (Penajam-Tanah Grogot)	19,500,000,000,000	Jalan Baru Ayah-Jladri	275,000,000,000	Jalan Baru Lingkar Rembang-Lasem	1,989,000,000,000
			Jembatan Tanabumbu-Pulau Laut	900,000,000,000	Jalan Bebas Hambatan Non Tol Lingkar Luar IKN	15,000,000,000,000	Jalan Baru Lingkar Luar Selatan Medan	2,843,000,000,000	Jalan Baru Sidangoli-Jailolo	1,260,000,000,000
			Jembatan Muna-Buton (Pembangunan)	2,087,000,000,000	Jalan Tol Demak-Jepara	5,520,000,000,000	Jalan Baru Akses KSPN Likupang	1,483,000,000,000	Jalan Baru Lingkar Tuban	1,552,000,000,000
			Jembatan Ternate- Tidore (Pembangunan)	1,890,000,000,000	Jalan Tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Tulungagung	53,250,000,000,000	Jalan Tol Sepaku-Semboja	2,550,000,000,000	Jalan Baru Kelua-Tanjung	870,000,000,000
			Jembatan Batam-Bintan (Pembangunan)	9,498,000,000,000	Jalan Tol Kuningan-Tasikmalaya	8,700,000,000,000	Jalan Tol Samarinda-Teng-garong	5,850,000,000,000	Jalan Tol Manado-Amurang (Minahasa Utara-Minahasa-Tomohan-Minahasa Selatan)	4,500,000,000,000
			Jalan Bebas Hambatan Mamminasata	9,190,000,000,000			Jalan Tol Tanah Grogot-Penajam	16,800,000,000,000	Percepatan Pembangunan Tol Palembang-Betung	10,950,000,000,000
			Jalan Transpapua	10,600,000,000,000			Jalan Tol Batulicin-Tanah Grogot	33,900,000,000,000	Jembatan Bitung-Lembeh (Pembangunan)	1,260,000,000,000
			OM Jembatan Suramadu	661,980,874,538						
Permukiman	PSEL Sarbagita	2.355.170.000.000	SPAM Kota Pekan-baru	749.000.000.000	PLTSa Bakung Bandar Lampung	1.200.000.000.000	SPAM Regional Petanglong	370.000.000.000	SPAM Regional Lintas Madura	750.000.000.000



Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)	Paket	Nilai Investasi (Rp)
	SPAM Regional Jatiluhur I	2.026.903.614.184	TPPAS Legok Nangka	3.450.000.000.000	SPAM Regional Jatigede	2.100.000.000.000	SPAM Regional Malang Raya	650.000.000.000	SPAM Kendari	350.000.000.000
	SPAM Karian Serpong	2.215.052.000.000	SPAM Regio-nal Djuanda	5.900.000.000.000	SPAM Ayung	2.000.000.000.000	TPAS Manggar	700.000.000.000	TPA Regional Mebidang-ro	300.000.000.000
			SPAM Regio-nal Sarbagikung	3.200.000.000.000	SPAM Kamijoro	270.000.000.000	SPAM Regional Karian Barat	1.210.000.000.000		
Perumahan	Perumahan Perkotaan/Metropolitan Ujung Berung Cisaranten	1.100.000.000.000	Perumahan Perkotaan/ Metropo-litan Jabodetabek	1.200.000.000.000	Perumahan Perkotaan/ Metropolitan Palembang	600.000.000.000	Perumahan Perkotaan/ Metropo-litan Semarang	600.000.000.000	Peruma-han TOD KA Makassar Pare-pare	900.000.000.000
			Perumahan TOD Jawa Barat	1.200.000.000.000	Perumahan Perkotaan/ Metropolitan Medan	1.200.000.000.000	Peruma-han Perkotaan/ Metropolitan Batam	600.000.000.000	Peruma-han IKN Kalimantan Timur	135.000.000.000.000



ALAMAT

Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
12110



KONTAK

Tlp. (021) 7262535
E-mail.
datin.pembiayaan@gmail.com



WEBSITE

pembiayaan.pu.go.id